

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang - undang Nomor 62 Tahun 2024 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan pemerintah yang disusun setiap tahun dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, APBN berfungsi sebagai instrumen utama kebijakan fiskal pemerintah yang digunakan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya, mendistribusikan pendapatan, serta menstabilkan perekonomian nasional. Melalui pengelolaan APBN, pemerintah berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan pemerataan kesejahteraan, dan menjaga stabilitas makroekonomi. Oleh karena itu, sistem penganggaran yang ada didalam APBN harus disusun secara konsisten, transparan, dan akuntabel agar dapat mencerminkan prioritas pembangunan nasional secara efektif dan efisien.

Praktik penyusunan APBN di Indonesia memiliki empat tahapan utama berdasarkan buku Pokok - Pokok Siklus APBN di Indonesia yang disusun oleh Direktorat Penyusunan APBN (2014), yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Setiap siklus APBN sering menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi antara pagu indikatif, pagu anggaran, dan pagu alokasi anggaran. Konsistensi anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mempertahankan rencana awal dari tahap perencanaan hingga tahap realisasi. Penelitian mengenai konsistensi penganggaran menjadi hal penting karena penelitian tersebut menunjukkan tingkat kesesuaian pelaksanaan kebijakan fiskal dengan rencana awal. Ketidakkonsistenan pagu anggaran dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti penyesuaian kebijakan fiskal, perubahan asumsi makroekonomi, fluktuasi penerimaan negara, dan faktor tak terduga lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah perlu menjaga konsistensi penganggaran untuk menjamin efektivitas kebijakan fiskal di Indonesia.

Salah satu faktor internal yang dapat memengaruhi ketidakkonsistenan adalah faktor internal yang berasal dari dalam struktur APBN itu sendiri, yaitu komposisi rincian belanja per jenis yang terdiri atas Belanja pegawai berfungsi

untuk membiayai kompensasi bagi aparatur negara, Belanja barang digunakan untuk mendukung operasional dan pelayanan publik, Belanja modal diarahkan untuk investasi jangka panjang seperti infrastruktur, Belanja bantuan sosial digunakan sebagai instrumen redistribusi pendapatan dan perlindungan sosial bagi masyarakat. Setiap komponen belanja per jenis ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Ketidakseimbangan dalam proporsi antar jenis masing-masing belanja tersebut dapat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran serta tingkat konsistensi pengalokasian anggaran.

Selain faktor internal, sistem penganggaran juga dipengaruhi oleh faktor struktural kelembagaan, khususnya dalam pengelolaan anggaran pada kementerian dan lembaga negara. Setiap kementerian memiliki karakteristik tugas dan fungsi yang berbeda, sehingga memerlukan struktur belanja yang berbeda pula. Oleh karena itu, analisis terhadap pola belanja per jenis pada kementerian dan lembaga menjadi penting untuk memahami bagaimana variasi struktur belanja memengaruhi proses penganggaran.

Penelitian ini memfokuskan objek pengamatan pada 16 kementerian yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Penelitian ini memilih kementerian tersebut berdasarkan pertimbangan peran strategis kementerian dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah lintas sektor serta besarnya porsi alokasi anggaran yang dimiliki. Penelitian ini mengharapkan penggunaan sampel kementerian tersebut dapat menggambarkan pola penganggaran pemerintah secara lebih representatif dalam konteks pelaksanaan kebijakan nasional.

Selama periode pengamatan, pola belanja pemerintah mencerminkan dinamika kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional. Pada beberapa periode, kebijakan fiskal difokuskan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan reformasi birokrasi. Perubahan prioritas kebijakan tersebut turut memengaruhi komposisi belanja per jenis pada masing-masing kementerian dan lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan

struktur belanja per jenis berpotensi memengaruhi konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran kementerian/lembaga.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa variabel belanja per jenis memiliki peran penting dalam proses perencanaan dan pengalokasian anggaran pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Zamaro (2016), mengenai analisis perhitungan proyeksi belanja operasional kementerian negara dan lembaga menggunakan variabel alokasi dan realisasi menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada periode sebelumnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memproyeksikan kebutuhan belanja pada periode berikutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pola realisasi anggaran memiliki keterkaitan erat dengan proses penyusunan rencana anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Zuwita Sari (2020), mengenai pengaruh realisasi anggaran belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal terhadap penetapan pagu indikatif menunjukkan bahwa komponen belanja per jenis memiliki pengaruh terhadap proses penetapan alokasi anggaran awal pada instansi pemerintah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa struktur belanja per jenis merupakan variabel penting dalam menentukan kebijakan alokasi anggaran serta berpotensi memengaruhi konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel belanja per jenis dan variabel alokasi anggaran memiliki hubungan yang erat dalam proses penganggaran pemerintah.

Perubahan yang terjadi baik dari faktor internal maupun faktor kelembagaan tersebut menguji sistem penganggaran APBN dalam menjaga konsistensi antara rencana dan realisasi anggaran. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana belanja per jenis memengaruhi tingkat konsistensi alokasi anggaran, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal pasca pandemi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas pengelolaan anggaran pemerintah dalam menjaga kesinambungan fiskal dan mendukung prioritas pembangunan nasional. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mengambil topik **"Pengaruh Belanja per Jenis terhadap Penganggaran Kementerian Negara dan Lembaga"**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh komposisi belanja per jenis (belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial) terhadap konsistensi pengalokasian anggaran dalam APBN?
2. Belanja per jenis manakah yang memiliki pengaruh paling besar terhadap konsistensi penganggaran dalam APBN?
3. Bagaimana model proyeksi yang dapat memperkirakan tingkat konsistensi pengalokasian anggaran dalam APBN berdasarkan belanja per jenis?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh komposisi belanja per jenis terhadap tingkat konsistensi alokasi anggaran dalam APBN.
2. Menentukan pengaruh paling besar terhadap konsistensi penganggaran dalam APBN.
3. Menganalisis model proyeksi yang dapat memperkirakan tingkat konsistensi pengalokasian anggaran dalam APBN berdasarkan belanja per jenis.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memberikan pengalaman empiris dalam menganalisis konsistensi alokasi anggaran melalui belanja per jenis dan pengelolaan fiskal di Indonesia yang bermanfaat baik untuk keperluan akademik maupun profesional di masa depan.

2. Manfaat Bagi Akademis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur mengenai konsistensi penganggaran dan pengelolaan fiskal di Indonesia, terutama dalam konteks peran jenis-jenis belanja dalam menjaga stabilitas APBN.

3. Manfaat Bagi Praktisi

Diharapkan dapat memberikan gambaran menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi dalam merumuskan strategi penganggaran yang lebih konsisten dan responsif terhadap perubahan ekonomi, khususnya dalam situasi pascapandemi.